

PKS Anggap Wajar Jika Golkar Tak Dukung Anies di Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menilai wajar bila Partai Golkar tak mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

Aboe Bakar mengatakan, perbedaan sikap dalam sebuah kontestasi pilpres merupakan hal yang wajar.

"Perbedaan pilihan capres itu adalah hal yang wajar terjadi ketika mendekati kontestasi pilpres. Oleh karena itu, kami menyampaikan dukungan penuh pada Golkar untuk menentukan pilihan capres yang akan diusung pada 14 Februari 2024," ujar Aboe dalam keterangannya, Jumat (4/8).

Seperti diketahui bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sendiri sampai saat ini masih kokoh dan konsisten mendukung Anies Baswedan. Dia menekankan ketiga partai dalam koalisi tengah sibuk mensosialisasikan Anies di daerah-daerah.

"Dalam koalisi ini, kami yakin bahwa satu tiket sudah cukup untuk

memberangkatkan pasangan capres dan cawapres. Saat ini, fokus kami adalah untuk menyosialisasikan profil capres kami ke daerah-daerah," kata Aboe.

PKS sudah erupaya keras melalui mesin politiknya untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Dia yakin mitra PKS di koalisi, yakni Nasdem dan Demokrat memiliki kesibukan yang sama.

"Kami percaya bahwa kesibukan rekan-rekan ini tidak akan terpengaruh oleh pernyataan seputar dukungan capres. Kami semua fokus pada tugas masing-masing," jelas Aboe.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, partainya tidak mungkin memberikan dukungan kepada bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan.

Dia pun membenarkan bahwa dukungan Partai Golkar kemungkinan hanya akan diberikan kepada bakal capres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. ● han

Dirdik KPK Diminta Johanis Tanak Jadi Saksi Meringankan di Sidang Etik

JAKARTA (IM) - Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigien Asep Guntur Rahayu diajukan sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Anggota Dewan Pengawasan (Dewas) KPK Syamsuddin Haris mengatakan, kehadiran Asep dalam sidang tersebut merupakan permintaan Tanak.

"Pak Asep jadi saksi yang meringankan yang diajukan oleh Pak JT (Johannis Tanak)," kata Syamsuddin saat dikonfirmasi, Jumat (4/8).

Asep datang ke kantor Dewas KPK di gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan pukul 08.58 WIB.

Selain Asep, Dewas juga memeriksa Ketua KPK Firlil Bahuri sebagai saksi dalam sidang perkara Johannis Tanak. Menurut Syamsuddin, Firlil sudah bersaksi di muka sidang selama sekitar satu setengah jam.

"Pak FB (Firlil Bahuri) sudah tadi jadi saksi jam 09.00 sampai 10.30," tutur Syamsuddin.

Pada persidangan sebelumnya, Kamis (27/7), Dewas telah meminta keterangan dari dua Wakil Ketua KPK, yaitu Nawawi Pomolongo dan Nurul

Ghufron.

Kepada wartawan, Nawawi mengaku diminta memberi kesaksian terkait kegiatan pimpinan KPK pada 27 Maret 2023. Sebab, pada tanggal tersebut Johannis Tanak diduga berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Idris Froyoto Sihite.

Padahal, Idris sedang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, hasil pemeriksaan Dewas menyatakan dugaan pelanggaran etik Johannis Tanak cukup bukti naik ke persidangan. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut Tanak terbukti berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite pada 27 Maret. Padahal, Sihite menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK.

"Hal ini dikuatkan dengan fakta kehadiran saudara JT dalam expose perkara Kementerian ESDM pada 27 Februari 2023," ujar Albertina. ● han

Kasus Panji Gumilang, Kemenag Siapkan Saksi Ahli jika Diminta

JAKARTA (IM) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas akan menyiapkan saksi ahli atas kasus dugaan penistaan agama oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, jika diminta. Hal ini diungkapkan Yaqut saat ditemui di acara penyampaian formasi CASN Kementerian Agama (Kemenag) di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

"Kalau (kasus dugaan) penodaan agama, kalau kita nanti dimintai saksi ahli gitu misalnya, kita akan siapkan," kata Yaqut, Jumat (4/8).

Yaqut pun tidak mau mengomentari kasusnya lebih jauh mengingat proses hukum pada saat ini berada di tangan Bareskrim Polri. Namun yang jelas, kata dia, pihaknya siap jika diminta menyiapkan saksi ahli atas kasus penistaan agama tersebut.

"Apakah ini merupakan penodaan agama atau tidak, kita bertugas menyiapkan saksi-saksi ahli, bukan mengomentari kasusnya ya, enggak boleh. Jadi kalau menyiapkan saksi ahli, pasti

kita siapkan saksi ahli," ucap Yaqut.

Lebih lanjut, Yaqut menyebut, pemerintah tidak mau menghilangkan hak para santri untuk belajar dan menuntut ilmu. Bisa saja, kata dia, lembaga pendidikan itu tetap berjalan, namun mengikuti pendidikan di bawah pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Para pengajarnya pun akan dinilai terkait cara pengajarnya, cara rekrutmentnya, hingga ideologi yang berkembang di lingkungan sekolah.

"Anak-anak, santri-santri yang ada di sana tetap bisa mengikuti pendidikan tapi di bawah pengawasan yang ketat agar tidak ada hidden kurikulum dalam Al Zaytun yang mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Saya kira itu," katanya.

Seperti diketahui, Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa (1/8) malam. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



ANIES BASWEDAN KUNJUNGI RUMAH TEMU RELAWAN DUREN TIGA

Bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) menyapa relawan saat kunjungan ke Rumah Temu Relawan Duren Tiga di Jakarta, Jumat (4/8). Kunjungan tersebut dalam rangka safari politik sekaligus bersilaturahmi bersama relawan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Terbuka jika UU Peradilan Militer Direvisi

Panglima TNI terbuka atas wacana merevisi UU tentang Peradilan Militer. Yudo menegaskan bahwa TNI tunduk dengan apapun keputusan politik pemerintah.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer layak untuk direvisi agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Ma'ruf mengatakan, wacana revisi UU Peradilan Militer adalah hal yang wajar karena UU yang sudah lama berlaku memang perlu untuk disempurnakan.

"Saya kira Undang-Und

ang (Nomor) 31 itu juga saya akan mengalami hal yang sama, ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan (agar) lebih sesuai dengan tuntutan keadaan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Samarinda, Jumat (4/8).

Ma'ruf mengatakan, wacana revisi UU Peradilan Militer adalah sebuah keniscayaan. Ia pun sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut revisi UU Peradilan Militer patut segera dibahas.

"Saya kira kita silakan terus berjalan (wacana revisi UU Peradilan Militer) dan sesuai dengan aspirasi yang muncul dan tentu ingin undang-undang itu kan lebih baik merespons tuntutan keadaan yang terjadi," kata Ma'ruf.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun terbuka atas wacana merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yudo menyatakan, TNI akan tunduk dengan apapun keputusan politik pemerintah terkait wacana tersebut.

"Kalau mau diubah dan sebagainya, kita tunduk pada

keputusan politik negara. Kita kan melaksanakan ini, ini adalah keputusan politik negara, ya kita laksanakan," kata Yudo di Markas Besar TNI, Jakarta, Jumat (4/8).

Menurutnya, TNI saat ini sudah jauh lebih terbuka meski masih menggunakan beberapa produk hukum era Orde Baru, termasuk UU Peradilan Militer. Ia pun membuka pintu bagi masyarakat yang ingin berdiskusi, berkoordinasi, dan bersilaturahmi terkait kasus ini.

"Kita sudah berubah sesuai keputusan politik pemerintah. Kita sudah berubah, berubah, dan berubah. Kalau nggak percaya, ya ayo, datang ke TNI,

kami pun juga tidak tertutup untuk itu," kata Yudo.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sesuai dengan UU Peradilan Militer. Pasalnya, kasus ini melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfian dan dan Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto yang berstatus anggota TNI aktif.

"Karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu," kata Yudo. ● han

KPK Dalam Aliran Uang Panas Dugaan Korupsi di Lingkungan Kemenhub

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan bagi-bagi uang proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sejumlah pihak diduga ikut menikmati aliran uang panas ari pengusaha yang menggarap proyek-proyek di Kemenhub.

Penyidik KPK saat ini sedang mendalami aliran uang 'panas' di lingkungan Kemenhub dengan memeriksa tiga saksi yakni, Pegawai Honorar Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung, Dari Ramdhani serta dua Wiraswasta, Kukuk Dedy Eko Cahyono dan Devi Rachmanniar.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penerimaan aliran uang di lingkungan Kemenhub yang diberikan tersangka DRS (Dion Renato Sugiarto) dkk sebagai salah satu pihak swasta yang dimenangkan untuk mengerjakan proyek di Kemenhub," beber Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat ke wartawan, Jumat (4/8).

Sementara itu, terdapat tiga saksi wiraswasta yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Ketiga saksi tersebut yakni, Freddy Gondwardoyo; Hendri Gondwardoyo; serta Ferry Septha Indrianto alias Gareng.

"Para saksi tidak hadir dan dijadwal ulang kembali," ucap Ali.

Sebelumnya, KPK mengaku telah mengantongi informasi adanya aliran uang dugaan suap terkait proyek pekerjaan pembangunan jalur kereta api yang mengucur ke petinggi Kemenhub. KPK saat ini sedang menyelidiki pihak-pihak yang kecipratan uang panas proyek jalur kereta api tersebut.

KPK pun sudah menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan

jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap.

Keenam tersangka penerima suap yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Timandi; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumaryaya.

Kemudian, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar), Synto Pirjani Hutabarat.

Sementara itu, empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap yakni, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; mantan Direktur PT KA Manajemen Properti, Yoseph Ibrahim, serta Vice Presiden PT KA Manajemen Properti, Parjono.

Dalam perkara ini, enam pejabat DJKA Kemenhub diduga telah menerima suap senilai Rp14,5 miliar terkait empat proyek jalur kereta api di Indonesia. Empat proyek yang menjadi bancakan tersebut yakni, proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso.

Kemudian, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan Sebidang Jawa - Sumatera.

Keenam pejabat pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu diduga menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek sekira 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek tersebut. ● han

Peradilan Militer Tak Sebabkan Impunitas, Panglima TNI: Lihat Penjaranya Kayak Apa

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, kasus suap proyek yang melibatkan Kabasarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfian, dan Koormin Basarnas Letnan Kolonel Adm Afri Budi Cahyanto akan terus berlanjut. Meskipun, saat ini penanganannya berada di Puspom TNI.

Yudo menegaskan bahwa tidak ada pembebasan hukum atau impunitas jika anggotanya terlibat suatu kasus dan masuk peradilan militer.

"Sekarang dalam rangka penyidikan sudah ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu lalu itu. Dan sudah saya tanda tangani untuk ditahan masuk tahanan itu kalau Pati kan Panglima TNI," kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/8).

"Tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan ini, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah, masuk Peradilan Militer ada impunitas, tidak ada," katanya.

Lebih lanjut, Yudo meminta harus ada bukti untuk menunjukkan terjadinya impunitas yang diterima oleh prajurit TNI jika masuk peradilan militer.

"Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI kalau salah pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama karena kita yang masih berlaku UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer," kata Yudo.

"Ya kita laksanakan seperti itu. Kita tunduk pada hukum. Kalau mau diubah dan sebagainya kita tunduk pada keputusan politik negara. Kita kan melaksanakan ini, ini adalah keputusan politik negara, ya kita laksanakan," sambungnya.

Yudo pun meminta masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana hukuman yang diberikan dari

peradilan militer.

"Kalau masih ragu-ragu, ya silakan, ayo kita sama-sama melihat penjaranya kayak apa, penyidikannya kayak apa silakan," ucapnya.

Yudo pun mengungkap bahwa pertemuannya dengan Ketua KPK merupakan bentuk koordinasi dan silaturahmi. "Kalau ketemu kemarin ya koordinasi, silaturahmi tadi, ya tadi harus koordinasi koordinasi ya kita koordinasi," kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/8).

Yudo membantah jika pihaknya melakukan intimidasi kepada KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan Koormin Basarnas.

"Nggak usah takut tentang kayak intervensi kemarin dinyatakan, bukan, itu bukan intervensi. Jadi kalau intervensi itu saya memerintahkan Batalyon yang nggak tahu apa-apa tak suruh datang ke situ untuk memagar betis KPK, lah itu intervensi," katanya. ● han

FOTO: ANTARA



MANTAN MENDIKBUD WARDIMAN DJOJONEGORO MENGAJAR SEJARAH Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro menceritakan latar belakang perang Diponegoro saat mengajar sejarah di SMA 4, Malang, Jawa Timur, Jumat (4/8). Kegiatan bertajuk Juara Tokoh tersebut diadakan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI dengan tujuan memperkaya khazanah pengetahuan pelajar tentang sejarah kemerdekaan bangsa guna menumbuhkan jiwa nasionalisme.